

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada kontestasi elektoral pemimpin di Indonesia baik dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah tidak terkecuali desa pastinya menentukan pemimpinnya melalui pemilihan. Kontestasi pemilihan kepala desa atau yang sering disebut pilkades sering kali dianggap dinamis, hal ini dikarenakan munculnya banyak fenomena dan problematika. Adanya kontestasi tentunya mengarah pada perebutan kekuasaan diantara pemangku kepentingan sehingga, pemangku kepentingan akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh kemenangan. Kontestasi politik dalam kehidupan bernegara tidak akan pernah terlepas dalam kajian politik baik kontestasi politik pada pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, hingga Kepala Desa menjadi topik yang selalu menarik dipersoalkan.

Kontestasi politik elektoral bertujuan untuk memenangkan salah satu kandidat yang cocok menjadi pemimpin. Keputusan yang sudah disepakati harus diterima oleh setiap kandidat yang kalah dan juga masyarakat. Peluang terpilihnya kandidat Kepala Desa termasuk suatu bagian dari proses yang kompleks maka, kemenangan yang diraih sebagai hasil pemilihan umum tidak dilihat dari satu faktor saja dan modalitas tertentu. Hal ini juga ditegaskan oleh Prof. Kacung Marijan (2006) ada tiga modal utama yang harus dimiliki kandidat dalam pemilihan kepala desa yakni modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Apabila seseorang memiliki tiga modal utama tersebut besar kemungkinan untuk memenangkan pemilihan kepala desa dalam arena kontestasi politik. Masyarakat

tertarik pada kandidat dikarenakan memiliki modal tersebut. Semakin besar kandidat mengakumulasi ketiga modal tersebut, semakin tinggi juga peluangnya meraih legitimasi dari masyarakat (Febriansyah, Ropik, & Kawwami, 2021:202).

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan munculnya regulasi baru dengan semangat baru hadir untuk mengembalikan kedaulatan, otonomi, dan kewenangan desa. Desa merupakan arena partisipasi publik warga untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan warga memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Pemilihan kepala desa (Pilkades) sebagai salah satu proses dalam menentukan seseorang menjadi kepala desa dilakukan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) tahun dan dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota (Herman, 2016).

Kemudian adanya Peraturan Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan desa. Pengelolaan keuangan adalah merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Maka dari itu desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang titik tujuannya memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya alokasi dana desa pada tahun 2021 yang dikucurkan

pemerintah kepada desa terbilang cukup besar bisa mencapai kisaran 1,4 milyar per tahun. Dana desa wajib digunakan untuk empat hal utama, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Alfian, 2021:36).

Menilik pernyataan diatas, pemilihan kepala desa menjadi hal yang kompetitif saat ini mengingat jabatan kepala desa menjanjikan beragam keuntungan. Dengan begitu berbagai upaya yang dilakukan oleh kandidat untuk menarik simpati masyarakat. Untuk memperoleh legitimasi dalam kontestasi politik elektoral setiap kandidat bebas melakukan berbagai strategi politik untuk melakukan pendekatan dan mendapatkan dukungan politik dari masyarakat namun tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan pihak lain. Ada banyak variasi strategi yang digunakan, yaitu; penguatan sosialisasi politik, *politic marketing* dengan menerapkan 4ps yakni produk (*product*), promosi (*promotion*), penempatan (*place*), harga (*price*) dan *segmentation*, politik patronase dan klientelisme, bahkan *money politic*.

Politik patronase dan klientelisme menjadi strategi politik yang paling sering digunakan dalam kontestasi politik. Politik patronase dan klientelisme tidak hanya bergerak dalam pemilihan berskala kecil melainkan juga bergerak dalam skala besar yang melibatkan banyak sumber daya. Dalam strategi ini politisi berusaha membeli dukungan politik masyarakat. Pembagian keuntungan berupa pemberian amplop yang berisikan uang tunai, pembagian sembako, bantuan lainnya. Sudah menjadi rahasia umum untuk para politisi memobilisasi masyarakat dengan pendekatan transaksional untuk perolehan suara yang cukup

untuk memenangkan kursi jabatan. Pengaruh seringnya terjadi jual beli suara dikarenakan karena faktor sosial dan ekonomi (Rizqianah, 2019:13).

Kajian strategi politik patronase-klientelisme yang merujuk pada strategi yang digunakan kandidat dengan memanfaatkan status sosial, kekuasaan, kekayaan dan kekerabatan untuk menarik simpati dan mendapat dukungan dari masyarakat untuk menjatuhkan pilihan pada dirinya. Patronase bagi sebagian orang dianggap sebagai bagian dari politik uang, dimana politisi yang memiliki kekayaan dan kekuasaan berusaha menundukkan masyarakat dengan sumber daya rendah dengan memberikan material, janji politik sebagai stimulan dan lain sebagainya agar terlihat lebih meyakinkan. Klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi seseorang dan memiliki kuasa yang penuh. Politisi memiliki jaringan maupun relasi yang kuat baik terhadap tokoh masyarakat dan para elit politik yang kadang kala dijadikan sebagai perantara (*broker*) sebagai perpanjangan tangan politisi kepada masyarakat.. Walaupun dari dua strategi diatas terdapat perbedaan, namun dalam praktiknya kedua strategi tersebut memiliki keterkaitan yang erat.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa suara rakyat adalah yang utama dalam proses pemilihan dan pemenangan kandidat kepala desa. Ada dua hal penting mengenai hak-hak warga negara sebagai ciri pemerintahan yang demokratis, yaitu; pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat untuk menduduki jabatan di lembaga perwakilan rakyat. Sejalan dengan salah satu kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan yang mana setiap warga harus memiliki kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti

kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini, warga negara memahami dirinya sebagai badan hukum dan pihak yang otonom dalam suatu ikatan kedaulatan. Ketika berhadapan dengan pemerintah, itu akan menunjukkan identitas warga negara. Pentingnya pemenuhan hak dasar warga negara sebagai perwujudan dari demokrasi akan membentuk demokrasi yang kuat. Salah satu cara untuk mencapai ini dengan mengembangkan partisipasi aktif warga masyarakat melalui keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah (Setiawan, 2015).

Dengan jumlah masyarakat yang terbilang banyak dalam suatu desa, tentunya seorang kandidat tidak dapat menjangkau secara luas dalam melaksanakan strategi politiknya, oleh karena itu kandidat membutuhkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki potensi dan keunggulan untuk bekerjasama. Orang-orang yang terpilih dijadikan sebagai perantara (tim sukses) untuk menghubungkan kandidat kepala desa dengan masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki oleh perantara yang berasal dari latar belakang dan potensi yang dimiliki baik dari segi ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh diantara kandidat dan perantara dalam memperoleh hubungan timbal balik yang disebut sebagai keuntungan (Cameliawati, 2020:2).

Menyambung pernyataan diatas dalam kehidupan politik masyarakat desa pada umumnya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan terlebih hubungan darah (marga) dalam memilih kandidat sebagai calon pemimpin disuatu wilayah yang mereka tinggali. Sehingga pada umumnya mereka memilih kandidat yang semarga dengannya kecuali, jika terjadi perselisihan diantara mereka. Fenomena

ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa masih berkaitan erat dengan adanya hubungan kekeluargaan untuk memilih kandidat sebagai pemimpin. Sebenarnya realita ini merupakan suatu kelemahan dalam sistem kehidupan politik masyarakat di desa dengan kecenderungan menentukan pilihan dalam konteks politik condong kepada orang yang memiliki ikatan kekeluargaan. Oleh karena itu, faktor-faktor pembentuk kekuasaan seperti yang terdapat dalam kajian patronase dan klientelisme juga ditemui pada kontestasi politik di wilayah pedesaan. Hal ini juga terjadi di desa Tukka Dolok.

Desa Tukka Dolok merupakan salah satu desa di kecamatan Pakkat kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki tradisi lokal kuat yang diturunkan dari generasi ke generasi dapat dilihat dengan banyaknya kumpulan marga-marga (punguan marga) yang termasuk dalam organisasi nonformal. Solidaritas sosial dan interaksi sosial masih tinggi dan lebih intensif. Komunikasi dalam masyarakat yang bersifat personal menyebabkan antara satu dengan yang lainnya saling mengenal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa ditemukan bahwa pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tukka Dolok pada tahun 2021, terdapat lima kandidat yang mencalonkan diri dan hal ini menjadi sejarah pertama dalam desa tersebut dengan rekor calon kepala desa terbanyak dari periode-periode sebelumnya. Kelima calon tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik dari segi status sosial, kekayaan, kekerabatan, bahkan pengalaman dalam dunia pemerintahan. Kandidat nomor satu, Hoblin Simanullang tidak bertempat tinggal secara menetap di desa tersebut. Kedua Theressia Tumanggor, satu-

satunya calon perempuan yang sudah kali kedua mencalonkan dalam pilkades namun gagal. Ketiga, Sumartono Pardosi yang cukup aktif dalam kegiatan organisasi serta memiliki finansial yang cukup. Keempat, Hairul Marpaung dari masyarakat biasa dan yang terakhir Junghas Sitohang yang berstatus sebagai incumbent.

Pemilihan Kepala Desa Tukka Dolok di selenggarakan pada Senin, 22 November 2021 dengan 2 TPS. Dari hasil perolehan suara, Hoblin Simanullang memperoleh 221 suara, Theressia Tumanggor memperoleh 204 suara, Sumartono Pardosi memperoleh 232 suara, Hairul Marpaung memperoleh 8 suara, dan terakhir Junghas Sitohang memperoleh 121 suara. Dari kelima kandidat, Sumartono Pardosi memperoleh nilai lebih tinggi dan bisa disebut sebagai pemenang dalam pilkades 2021 setelah perhitungan suara.

Namun, sesuai pernyataan kontestasi politik elektoral selalu menimbulkan problematika. Pilkades Tukka Dolok menyebabkan munculnya perselisihan diantara beberapa masyarakat. Sesuai wawancara singkat dengan Ibu Dedy Magda Sihaloho selaku perangkat desa menyebutkan setelah pemilihan kepala desa berlangsung dan perhitungan suara terbanyak diraih oleh Sumartono Pardosi, beberapa masyarakat yang memilih kandidat lain merasa kurang puas, mereka menganggap kandidat yang menang kurang memenuhi kriteria-kriteria seorang pemimpin dan tidak sebanding dengan kandidat lainnya. Adanya anggapan bahwa kemenangan yang diraih karena memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa bunga, memberikan sumbangan, menyediakan lahan dan sawah digarap masyarakat, mempercayakan masyarakat untuk menjadi peternak lembunya,

sehingga banyak masyarakat berasumsi kebaikan yang ditanamkan menjadi modalnya menang, sedangkan untuk wawasan dan kewibawaan Sumartono Pardosi kurang.

Berdasarkan perolehan data diatas, fenomena ini cukup menarik untuk diteliti. Ditambah adanya fakta bahwa kandidat kepala desa yang terpilih merupakan penduduk yang baru bertempat tinggal didesa tersebut terhitung sejak Mei 2018 dan dianggap masih minim pengalaman dalam ranah perpolitikan dibanding empat kandidat lain, salah satunya *incumbent* periode sebelumnya yang juga mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa Tukka Dolok tahun 2021. Pada dasarnya dalam memilih seorang pemimpin melalui pemilihan kepala desa, masyarakat desa harus lebih bersifat objektif dengan melihat berbagai sisi seperti kualitas diri dan pengalaman calon pemimpin tersebut. Tidak cukup hanya bermodalkan status sosial, kekayaan dan kekerabatan, dengan begitu akan mimim menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti bermaksud mengetahui strategi pemenangan melalui bentuk dan praktik politik patronase dan klientelisme Sumartono Pardosi dalam pemilihan Kepala Desa Tukka Dolok tahun 2021 dengan berbagai asumsi masyarakat. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik meneliti **“Politik Patronase dan Klientelisme Sumartono Pardosi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tukka Dolok Tahun 2021”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertama kali di desa Tukka Dolok tahun 2021, ada lima kandidat yang mencalonkan diri dalam pilkades, antara lain: Hoblin Simanullang, Theresia Tumanggor, Sumartono Pardosi, Hairul Marpaung dan Junghas Sitohang.
2. Pelaksanaan pilkades Tukka Dolok pada 22 November 2021, Sumarto Pardosi berhasil mengalahkan empat kandidat lainnya, salah satunya petahana diduga menggunakan strategi politik patronase dan klientelisme. Hal ini dikarenakan dalam merebut perolehan suara yang tinggi, beliau memiliki modal finansial yang cukup (memiliki tanah daratan, sawah dan peternak lembu) dan relasi yang kuat (aktif dalam organisasi adat, punguan marga/arisan, serta menjadi pengurus dalam gereja) dibandingkan dengan modal politik yang dimilikinya.
3. Kemenangan yang diraih kandidat terpilih menyebabkan beberapa masyarakat pendukung kandidat lain merasa kurang puas, hal ini disebabkan adanya fakta bahwa kandidat terpilih masih minim pengalaman dalam dunia perpolitikan.
4. Diketahui kandidat terpilih merupakan warga yang baru bertempat tinggal di desa tersebut dibanding dengan kandidat lainnya, yaitu terhitung sejak Mei 2018.

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sehingga tidak mempengaruhi kefokusannya peneliti dalam melaksanakan penelitian dilapangan.

Oleh sebab itu, pada penelitian ini masalah yang akan dibahas dan diteliti ialah bagaimana bentuk dan praktik politik patronase dan klientelisme Sumartono Pardosi dalam memenangkan kontestasi elektoral di Desa Tukka Dolok Tahun 2021.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk dan praktik politik patronase dan klientelisme Sumartono Pardosi dalam memenangkan pemilihan kepala desa (Pilkades) Tukka Dolok tahun 2021?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Menilik pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan praktik politik patronase dan klientelisme Sumartono Pardosi dalam Pilkades Tukka Dolok tahun 2021.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemahaman terkait konsep dan teori strategi politik patronase dan klientelisme dalam politik elektoral di wilayah desa, khususnya bagi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan dan umumnya bagi pembaca penelitian ini nantinya.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan yang baru mengenai sistem politik patronase dan klientelisme dalam politik elektoral dan salah satu persyaratan meraih gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- b. Bagi Fakultas Ilmu Sosial, bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama.
- c. Bagi masyarakat desa, sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui bentuk dan praktik politik patronase dan klientelisme yang digunakan para kandidat untuk memenangkan pemilihan kepala desa, sehingga selanjutnya akan mempermudah masyarakat untuk lebih selektif memilih pemimpin .